

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran selama Triwulan II tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 15 Juli 2025

INSPEKTUR DAERAH

The official stamp of the Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang is a circular seal. It features a central emblem with a sun and a gear, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG" and "INSPEKTORAT DAERAH". A blue ink signature is written across the stamp.
AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.Hum.
NIP. 19660710 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	5
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	5
1.2. Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	15
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	17
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ..	17
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	18
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional.....	20
3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	21
3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	31
3.2. Realisasi Anggaran.....	34
3.3. Capaian Kinerja Lain.....	34
BAB IV. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Tabel Komposisi Pegawai.....	5
TABEL 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Maret 2025.....	5
TABEL 3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025	9
TABEL 4 Target IKU Inspektorat Daerah Tahun 2025	10
TABEL 5 Perjanjian Kinerja tahun 2025	10
TABEL 6 Rencana Aksi Tahun 2025.....	11
TABEL 7 Program Yang Mendukung IKU Tahun 2024	11
TABEL 8 Skala Nilai Kriteria Penilaian Kinerja.....	16
TABEL 9 Capaian Kinerja Tahun 2024	16
TABEL 10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Inspektorat Daerah	17
TABEL 11 Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023.....	18
TABEL 12 Capaian Kinerja dari Tahun 2024 s.d. 2025 (Triwulan I).....	19
TABEL 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional.....	20
TABEL 14 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	29
TABEL 15 Realisasi Anggaran	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Tahun 2025	2
Gambar 2 Grafik Capaian Indikator per Tahun	20
Gambar 3 Indikator Sistem Pengendalian OPD.....	22
Gambar 4 Profil Risiko Perangkat Daerah	23
Gambar 5 Profil Risiko Kabupaten.....	23
Gambar 6 Area Perencanaan	24
Gambar 7 Area Penganggaran.....	24
Gambar 8 Area Pengadaan Barang/Jasa	24
Gambar 9 Area Pelayanan Publik	25
Gambar 10 Area Manajemen ASN	25
Gambar 11 Area Pengelolaan BMD	25
Gambar 12 Area Optimalisasi Penerimaan Daerah	26
Gambar 13 Area Penguatan APIP	26
Gambar 14 Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Pemkab. Lumajang	27
Gambar 15 Portal Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB	28
Gambar 16 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Inspektorat Daerah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada periode triwulanan berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

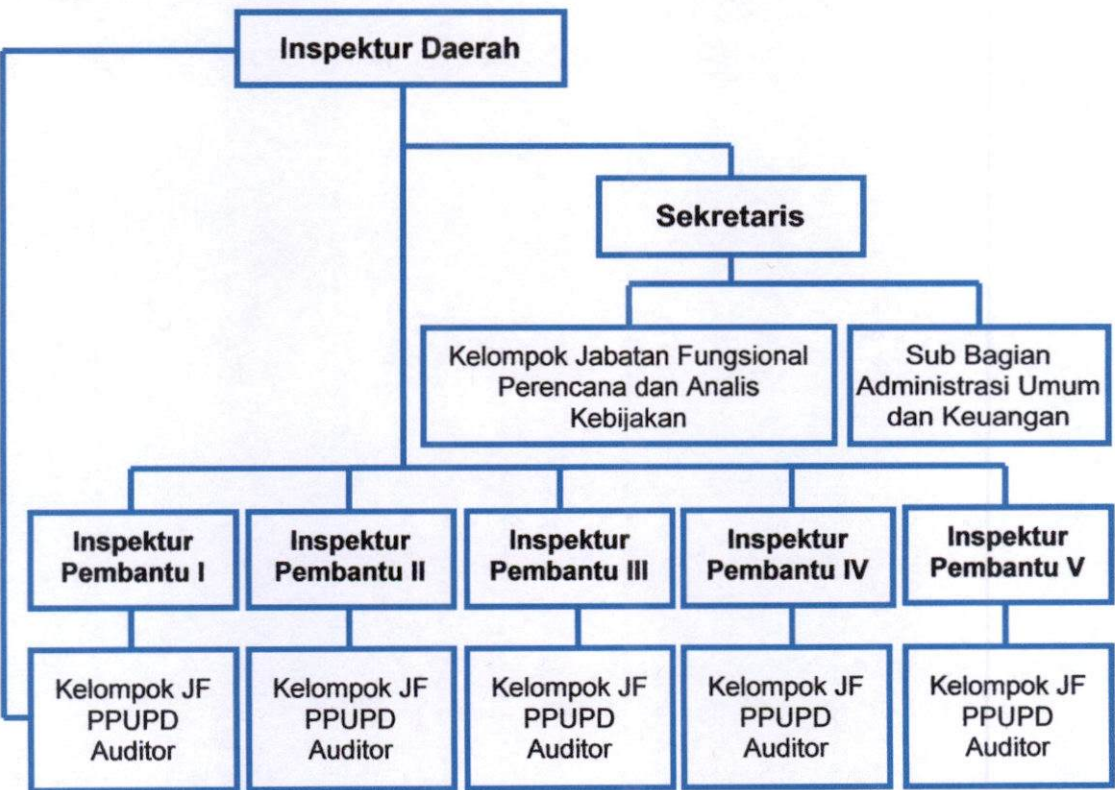
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan yang dipimpin

oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- 1. Inspektur Daerah
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Inspektur Pembantu I
- 4. Inspektur Pembantu II
- 5. Inspektur Pembantu III
- 6. Inspektur Pembantu IV
- 7. Inspektur Pembantu V
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Inspektorat Daerah adalah sebagaimana berikut



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

❖ **Inspektur Pembantu**

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap keuangan, kinerja, kepatuhan atas

penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas aspek kebijakan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, barang, urusan, serta aspek lain sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Inspektur Pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;
8. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya;
9. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pihak berwenang;
11. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur Daerah;
13. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur Daerah; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Inspektorat Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 54 orang (kondisi per 30 Juni 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Inspektur Pembantu	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	
4.	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
5.	Pejabat Fungsional	17	19	36	-	-	-	-	-	4	28	3	1	-	-	-	2 orang Plt. Irban
6.	Pejabat Pelaksana	3	3	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
7.	Tenaga Kontrak	6	1	-	-	7	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	
Jumlah		30	24	47	0	7	0	0	9	5	35	4	1	1	3	1	

Berdasarkan tabel 1 di atas, total pegawai Inspektorat Daerah per 30 Juni 2025 sebanyak 47 orang PNS, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 7 orang. Adapun komposisi pegawai PNS sebanyak 47 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang (1 orang Plt. Sekretaris), pejabat fungsional sebanyak 36 orang (2 orang Plt. Inspektur Pembantu (Irban)), pejabat pelaksana sebanyak 6 orang. Sedangkan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan sebesar 55,56 % : 44,44 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 30 orang dan perempuan sebanyak 24 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Inspektorat Daerah disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 30 Juni 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1.3.1	GOLONGAN TANAH	Bidang	1	
1.3.1.01	Tanah	Bidang	1	Bersertifikat
1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN	Buah /	544	

	MESIN	Set		
1.3.2.01	Alat - Alat Besar	Buah / Set	3	Baik
1.3.2.02	Alat - Alat Angkutan	Buah / Set	30	30 Baik
1.3.2.03	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Buah	26	26 Baik
1.3.2.05	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Buah	383	383 Baik
1.3.2.06	Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Buah	15	Baik
1.3.2.08	Alat – alat Laboratorium	Buah	1	Baik
1.3.2.10	Komputer	Buah	85	Baik
1.3.2.12	Alat Pengeboran	Buah	1	Baik
1.3.3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	Buah	3	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	Buah	3	Baik
1.3.5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	Buah / Set	165	
1.3.5.01	Buku dan Perpustakaan	Buah / Set	165	Baik

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern dan mitigasi risiko.
 Pengendalian internal oleh Kepala Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan melalui penerapan sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP) terintegrasi dengan Manajemen Risiko (MR). Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Kepala Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan APIP. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

2. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan.

Pemenuhan tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK/BPKP/Inspektorat Provinsi masih belum optimal dikarenakan masih terdapat temuan pada tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dan masih terdapat temuan berulang pada saat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah maupun BPK/BPKP/Inspektorat Provinsi.

3. Pencapaian Kapabilitas APIP kurang optimal

Sumber Daya Manusia yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap adanya pelanggaran/penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan yang terlewatkan oleh pengawasan APIP.

Selama 5 tahun terakhir, anggaran pengawasan Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengamanatkan anggaran pengawasan adalah sebesar 0,5 % dari total APBD. Hal ini secara tidak langsung membuat Inspektorat harus melakukan prioritas anggaran dan pemeriksaan yang akan dilakukan. Di sisi lain, semakin banyak mandatory dari pemerintah pusat yang juga wajib dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

4. Belum optimalnya Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Fungsi Inspektorat Daerah bukan lagi sebagai pengawas saja tetapi mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*) dan pengawasan pembinaan reformasi birokrasi. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat menjadi *trusted advisor* yang mampu memberikan jawaban/solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh

sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah terutama sumber daya manusia dan IT melalui *Fraud Risk Control* (FRC).

5. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya baik perbaikan sistem dan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir terjadinya korupsi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat sistem tersebut belum dilaksanakan dengan optimal.

6. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Belum optimalnya pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas pada perangkat daerah.

Bahwa nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang belum optimal karena permasalahan-permasalahan krusial seperti kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan dsb belum dapat diselesaikan. Kementerian PAN-RB telah melaunching RB Tematik untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Lumajang masuk kategori waspada. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada celah-celah yang masih memungkinkan menjadi awal terjadinya kasus korupsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Efektivitas Pengelolaan Risiko tingkat kabupaten	Angka	Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) + Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks) Kabupaten / 2	BPKP
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya sistem Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Pengendalian minimal 3,5	Persen	Jumlah Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Pengendalian Minimal 3,5 / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah X 100%	Olah Data Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Kepala Daerah dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	Angka	Nilai Survei Penilaian Integritas berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK RI	KPK RI
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	Angka	Nilai SPIP Kabupaten yang dikeluarkan oleh BPKP	BPKP
		MRI	Angka	Nilai MRI Kabupaten yang dikeluarkan oleh BPKP	BPKP
2.	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	Persen	Nilai MCP Kabupaten yang dikeluarkan oleh KPK	KPK
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	Angka	Hasil Penilaian Kemen PAN-RB	Kemen PAN-RB
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	Angka	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu sesuai ketentuan KPK	KPK
3.	Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	Persen	Perbandingan target dan realisasi atas nilai komponen kualitas renaksi RB	Kemen PAN-RB
4	Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	Nilai Kapabilitas APIP	BPKP

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025. Adapun perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	3,4
		Nilai MRI	3,1
2.	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	95,5
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	5

		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49
3.	Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	58%
4.	Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.067.432.000,00
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.957.043.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.877.629.958,57
	Jumlah	19.902.104.958,57

Pada periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini, dilaksanakan penyesuaian anggaran berdasarkan Surat Edaran Bupati Lumajang nomor : 900.1.1/11/427.73/2025 tetang Persiapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bupati Lumajang nomor : 900.1.1/12/427.73/2025 tentang Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam APBD Tahun 2025. Sehingga, anggaran untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah disesuaikan melalui pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 12 tahun 2021. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Berikut anggaran Inspektorat Daerah setelah penyesuaian/pergeseran :

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.067.412.000,00
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.957.043.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.877.539.958,57
	Jumlah	19.901.994.958,57

Untuk mencapai kinerja sesuai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025, maka disusun Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari perjanjian kinerja tahunan yang dirinci dalam periode triwulanan. Rencana Aksi digunakan sebagai pedoman untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
Rencana Aksi Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran strategis/ program/ kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target Kinerja (Triwulan)			
		I	II	III	IV
Tujuan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	0	0	0	78

Sasaran:					
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	0	0	0	3,4
	Nilai MRI	0	0	0	3,1
Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	0	0	0	95,5
	Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	0	0	5	0
	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	0	49	0	0
Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	0	0	0	58
Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0	3,1

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target	
			Target	Anggaran (Rp.)
1	Tujuan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	78	6.889.089.000
	1.Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	3,4	2.898.214.000
		Nilai MRI	3,1	
	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan Sasaran: Meningkatnya tindak lanjut atas hasil audit	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	2.067.412.000
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sasaran : Meningkatnya kualitas audit intern (assurance)	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	192	1.620.178.000
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sasaran : Meningkatknya kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesifik) yang diterbitkan	64	447.234.000
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Sasaran : Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian internal	Persentase capaian pemenuhan FRC / SPIP perangkat daerah	65%	830.802.000

	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sasaran: Meningkatnya pengendalian risiko di perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penilaian dan mitigasi risiko sesuai dengan kebijakan pengawasan	49	830.802.000
	2. Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	95,5	1.053.769.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	5	
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49	
	a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Sasaran :			1.053.769.000
	1) Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan lainnya (pembinaan)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	90%	
	2) Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sasaran : Meningkatnya kualitas pembinaan (consulting)	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan	49	1.053.769.000
		Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan diverifikasi	5	
	3. Sasaran 3 : Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	58%	136.004.000
	a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Sasaran:			136.004.000
	1) Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB Ex-ante	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi RB ex-ante	80%	
	2) Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB on going	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi RB on going	90%	
	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sasaran:			136.004.000
	1) Terlaksananya evaluasi RB Ex-ante	Jumlah OPD yang di evaluasi renaksi RB ex-ante	13	
	2) Terlaksananya evaluasi RB on going	Jumlah OPD yang di evaluasi renaksi RB on	13	

		going		
	4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1	2.801.102.000
	a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Sasaran : Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	10	936.468.000
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sasaran : Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	936.468.000
	b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran:			1.864.634.000
	1) Meningkatnya APIP yang tersertifikasi	Jumlah Auditor/PPUPD yang lulus sertifikasi pengawasan	25	
	2) Meningkatnya audit, QA, dan pengawasan lainnya yang dilakukan sesuai standar	Persentase Capaian PKPT	100%	
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko	Persentase kesesuaian PKPT dengan Rencana Kerja Tahunan	100%	12.198.000
	2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran: Meningkatnya pembinaan terhadap APIP	Jumlah Auditor/PPUPD yang mengikuti diklat pengawasan	25	1.852.436.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif),

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

digunakan rumus:

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 8
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan :				
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	0	0	0
	Sasaran :				
	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	0	0	0
		Nilai MRI	0	0	0
	2. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	0	0	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	0	0	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49	49	100%
	3. Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	0	0	0
	4. Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tabel 9 di atas dapat diketahui:

❖ Tujuan :

Indikator kinerja tujuan belum dapat disajikan realisasi dan capaian kerjanya

❖ Sasaran Strategis

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi $\geq$ 100% sebanyak 1 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 6 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di periode Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Inspektorat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi TW II	Capaian
1.	Tujuan :				
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	0	0	0
	Sasaran :				
	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	0	0	0
		Nilai MRI	0	0	0
	2. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	0	0	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	0	0	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49	49	100%
	3. Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	0	0	0
	4. Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0

Dari Tabel 10 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

❖ Tujuan : **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai SPI yang ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0. Pada Triwulan II ini Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK RI masih belum dimulai, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan.

❖ Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya efektivitas pengawasan internal**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator :

1. Nilai SPIP yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan.
2. Nilai MRI yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan.

Hal itu disebabkan karena, kedua indikator tersebut diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh BPKP, yang mana sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian belum dimulai.

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- 1. Nilai MCP yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan karena Nilai MCP diperoleh dari hasil evaluasi oleh KPK RI, sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian belum dimulai.
- 2. Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan karena sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian oleh Kementerian PAN-RB belum dimulai.
- 3. Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 49 Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar 49 Perangkat Daerah dan capaian kinerjanya sebesar 100%.

❖ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya rencana aksi RB daerah**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan karena sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB belum dimulai.

❖ **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas APIP**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Kapabilitas APIP yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya belum dapat disajikan sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan evaluasi oleh BPKP belum dimulai.

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 s.d. 2023
(Berdasarkan Dokumen P-Renstra Inspektorat Daerah 2018-2023)

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Tujuan: Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Efektivitas Pengelolaan Risiko tingkat kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	100%	3	3,16	105,33%
	Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,5	78,5	100%	80	75,21	94,01%

Sasaran Strategis: Meningkatnya system Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	62,71%	89,59%	75%	83,67%	111,56%
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--------	--------	-----	--------	---------

Tabel 12
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 s.d. 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	T	R	C	
1.	Tujuan :								
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	78	70,91	90,91%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
	Sasaran :								
	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	3,4	3,197	94,02%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
		Nilai MRI	3	3,097	103,23%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
	2. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	95%	95,23%	100,24%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	3 OPD	3 OPD	100%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	40 OPD	40 OPD	100%	49	49	100%	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
	3. Meningkatkan rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	80%	58%	72,5%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025
	4. Meningkatkan kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3	3,03	101%	0	0	0	Kondisi sampai dengan 30 Juni 2025

- Ket :
- T = Target
 - R = Realisasi
 - C = Capaian

Pada dokumen P-Renstra Inspektorat Daerah tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Inspektorat daerah memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis. Sedangkan pada kinerja Inspektorat Daerah dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 (Triwulan II) hasil penyesuaian IKU, memiliki 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada satu indikator yang sama yaitu indikator Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, belum dapat disajikan hasilnya karena belum mendapatkan hasil nilai SPI dari KPK RI.

Namun demikian, dari satu indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sebagai berikut:

Gambar 2
Grafik Capaian Indikator per Tahun



Dari grafik terlihat bahwa capaian indikator Indeks SPI mengalami penurunan secara terus-menerus sejak tahun 2022.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini (Triwulan II) dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan II) dengan Standar Nasional

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain	Capaian (%)
Tujuan:					
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	0	0	0	0
Sasaran Strategis:			0	0	0
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	0	0	0	0
	MRI	0	0	0	0
Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	0	0	0	0
	Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	0	0	0	0
	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49	49	0	0
Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0	0

Realisasi tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator Nilai SPI pada Triwulan II tahun ini jika dibandingkan dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

masih belum dapat disajikan karena nilai SPI diperoleh berdasarkan pada hasil survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK RI.

Sedangkan realisasi 4 (empat) sasaran strategis tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain karena tidak terdapat karakteristik yang sama.

3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan/sasaran Inspektorat Daerah sebagian besar belum dapat disajikan hasilnya serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota Lain yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN

Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN yang diukur dengan indikator Nilai SPI, capaian kinerja tahun ini sampai dengan 30 Juni 2025 belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) diperoleh berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK RI dan sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan survei belum dimulai, masih dalam tahap pengumpulan data responden baik internal, eksternal maupun eksper.

Sebagai antisipasi telah dilakukan upaya berikut :

- a. Mengikuti acara Kick-off Meeting SPI 2025 dan Tindak Lanjut Hasil SPI 2024 secara daring yang diselenggarakan oleh KPK pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Bagian Organisasi Setda Lumajang dengan pokok bahasan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil SPI tahun 2024 Kabupaten Lumajang sebagai salah satu faktor koreksi dalam Penilaian SPI tahun 2025 pada tanggal 6 Mei 2025 bertempat di Ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
- c. Melaksanakan Sosialisasi RTL Kabupaten dan RTL Perangkat Daerah serta persiapan pelaksanaan survey dan responden pada tanggal 12 Juni 2025 bertempat di Ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sosialisasi tersebut diikuti oleh PIC (Person in Charge) SPI 2025 Perangkat Daerah.

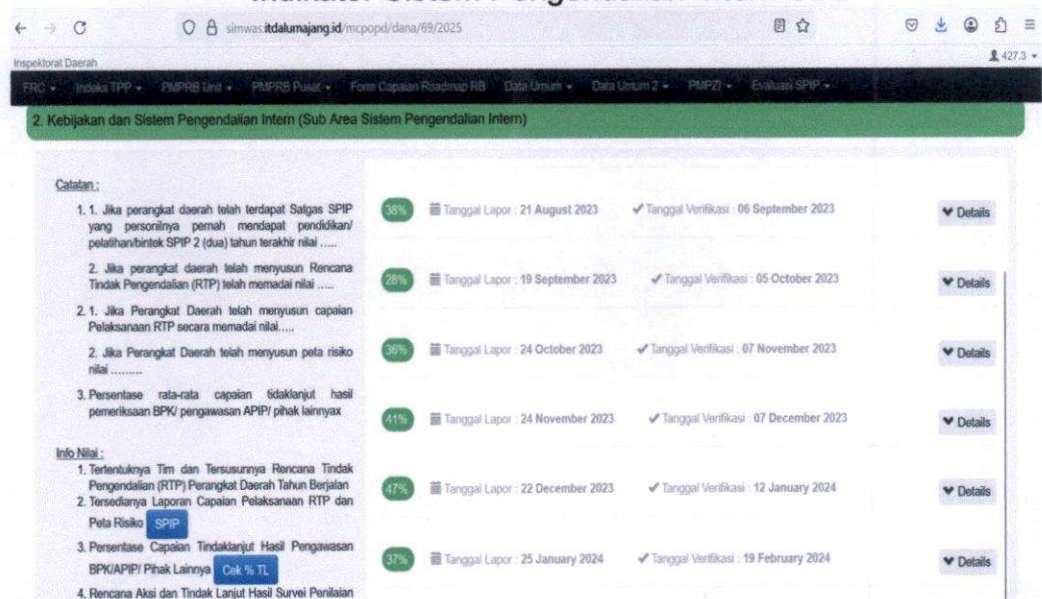
- d. Melaksanakan koordinasi dengan BKD Kabupaten Lumajang terkait Data Populasi Internal Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 melalui surat nomor : 700.1.2.5/62/427.3/2025 tanggal 13 Juni 2025.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Lumajang terkait Data Populasi Eksternal (pengguna layanan dan peserta pengadaan Barang/Jasa) Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 melalui surat nomor : 700.1.2.5/63/427.3/2025 tanggal 16 Juni 2025.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Akademisi/Lembaga/Ormas/Media Massa/Purna Tugas ASN terkait Data Populasi Eksper Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 melalui surat nomor 700.1.2.5/393/ 427.3/2025 s.d. 700.1.2.5/410/ 427.3/2025.

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan internal**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai SPIP yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0 dan Nilai MRI yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, capaian kinerja tahun ini sampai dengan 30 Juni 2025 belum dapat disajikan. Hal itu disebabkan karena kedua indikator tersebut diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh BPKP, yang mana sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian belum dimulai.

Sebagai antisipasi telah dilakukan upaya untuk mencapai target yakni dengan melakukan pemantauan kepada seluruh perangkat daerah melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) Fraud Risk Control (FRC) dengan URL simwas.itdalumajang.id dalam melakukan penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP) beserta pemenuhan laporan capaiannya dan penyusunan peta risiko (umum, kecurangan (Fraud), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)).

Gambar 3
Indikator Sistem Pengendalian Intern OPD



Gambar 4
Profil Risiko Perangkat Daerah

Profil Risiko Perangkat Daerah									
Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Tahun : 2025									
No.	Indikator	Sub Indikator	Info Nilai	Risiko					Capaian
				1	2	3	4	5	
1	Mandiri Umum	Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern (Sub Area Kebijakan)							
			1. Terdapat Prosedur dan Perencanaan penyusunan peraturan / identifikasi peraturan/kebijakan yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah						Sesuai Harapan 100
			2. Rekapitulasi/ daftar/ database peraturan teknis penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah						Bahaya / Risiko Tinggi 0
			3. Daftar peraturan yang tidak selaras/ harmonis/ perlu dilakukan perubahan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan						Bahaya / Risiko 0

Gambar 5
Profil Risiko Kabupaten

Profil Risiko Kabupaten Periode : 2025									
No.	Indikator	Sub Indikator	Info Nilai	Risiko					Capaian
				1	2	3	4	5	
1	Mandiri Umum	Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern (Sub Area Kebijakan)							
			1. Terdapat Prosedur dan Perencanaan penyusunan peraturan / identifikasi peraturan/kebijakan yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah						Tidak Sesuai Harapan 44.21%
			2. Rekapitulasi/ daftar/ database peraturan teknis penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah						Tidak Dapat Diterima 34.95%
			3. Daftar peraturan yang tidak selaras/ harmonis/ perlu dilakukan perubahan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan						Tidak Dapat Diterima 24.83%
		Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern (Sub Area Sistem Pengendalian Intern)							
			1. Terbentuknya Tim dan Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah Tahun Berjalan						Tidak Dapat Diterima 32.30%
			2. Tersedianya Laporan Capaian Pelaksanaan RTP dan Peta Risiko						Bahaya / 11.21%

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator :

1. Nilai MCP yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, belum dapat dihitung realisasi dan capaian kinerjanya karena Nilai MCP diperoleh dari hasil evaluasi oleh KPK RI, sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian belum dimulai namun Pemerintah Daerah sudah dapat memulai input data/dokumen pendukung sesuai area intervensi pada sistem <https://jaga.id>.

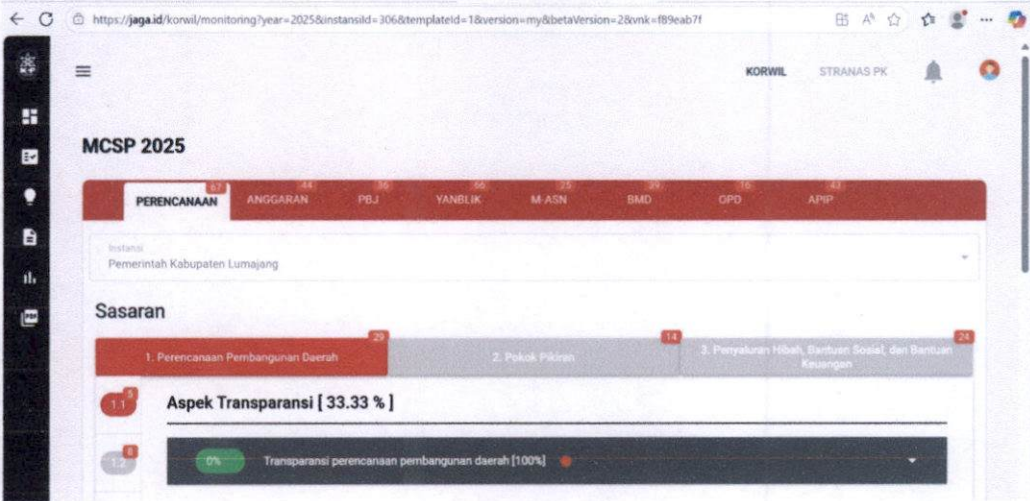
Sebagai antisipasi telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemenuhan Permintaan KPK terkait Upaya Pencegahan Korupsi melalui Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada tanggal 27-28 Mei 2025 bertempat di Ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Kegiatan

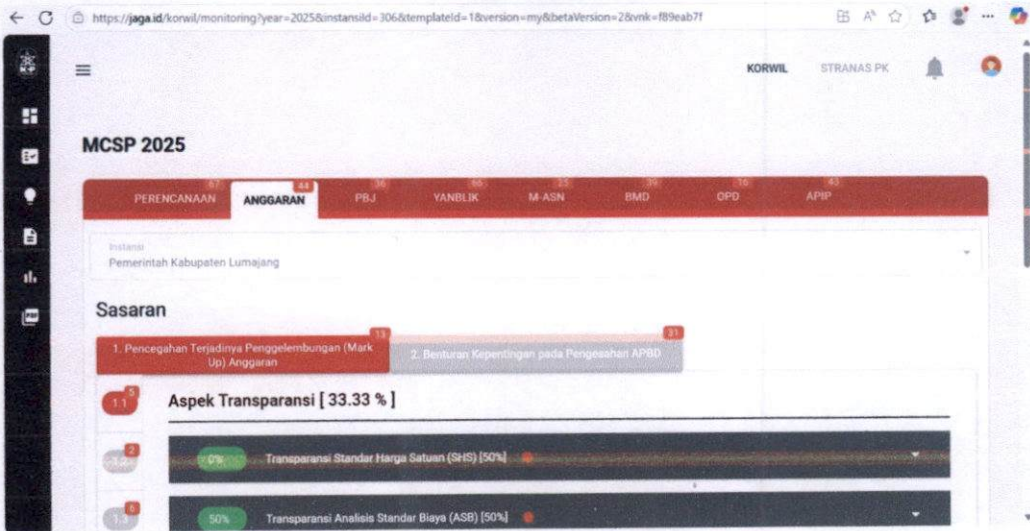
tersebut diikuti oleh Perangkat Daerah terkait 8 (delapan) area intervensi MCSP 2025.

- b. Melaksanakan input data/dokumen pendukung pada sistem <https://jaga.id> sesuai ketersediaan data/dokumen pendukung yang dihimpun dari Perangkat Daerah terkait 8 (delapan) area intervensi MCSP 2025.

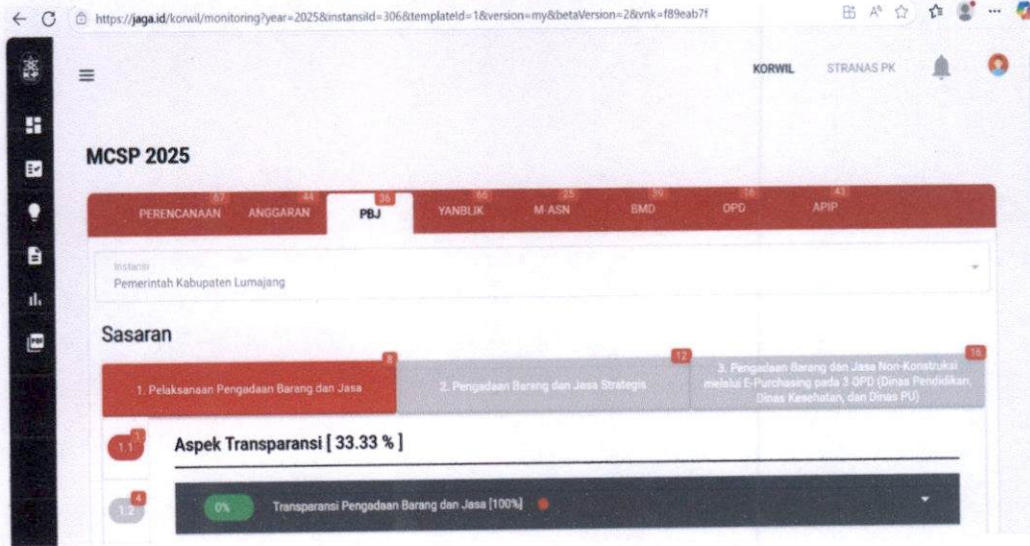
Gambar 6
Area Perencanaan



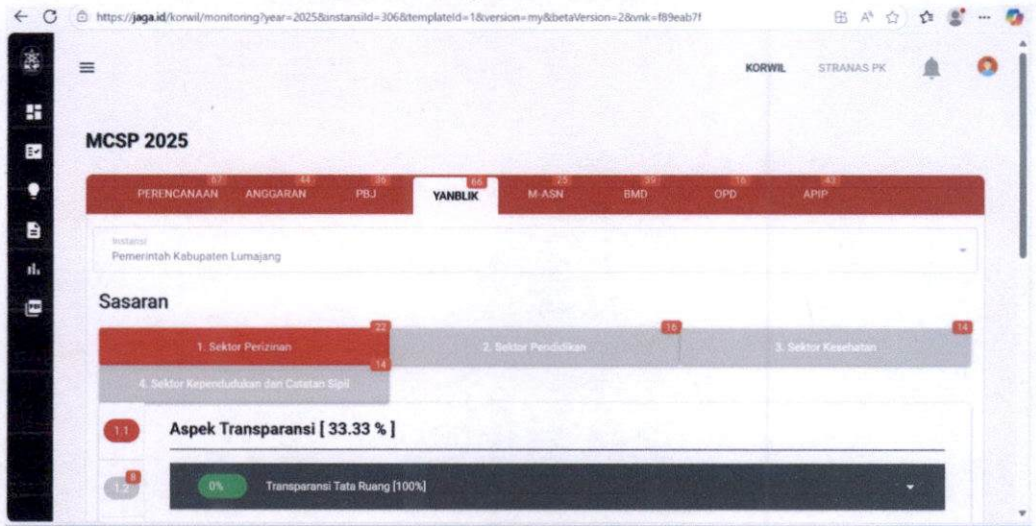
Gambar 7
Area Penganggaran



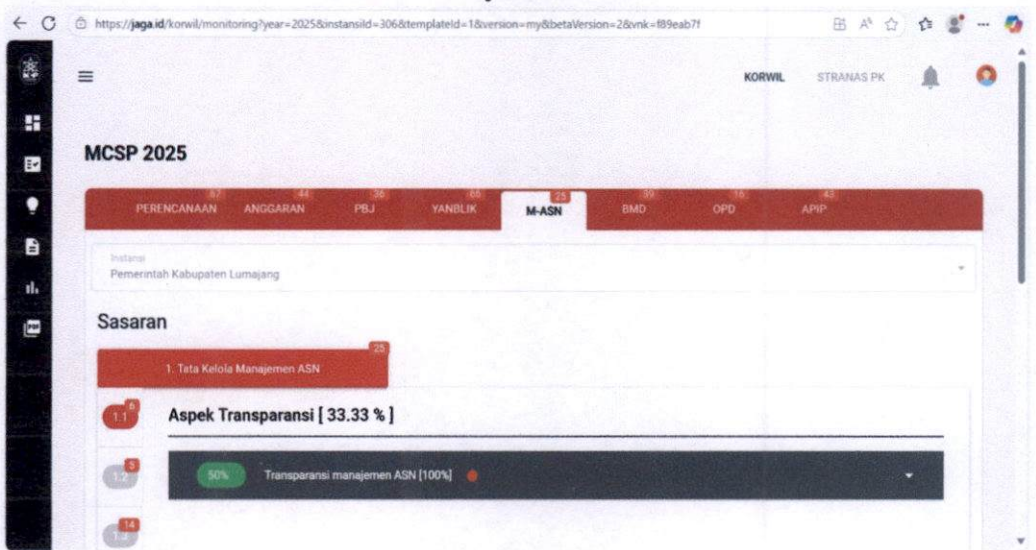
Gambar 8
Area Pengadaan Barang/Jasa



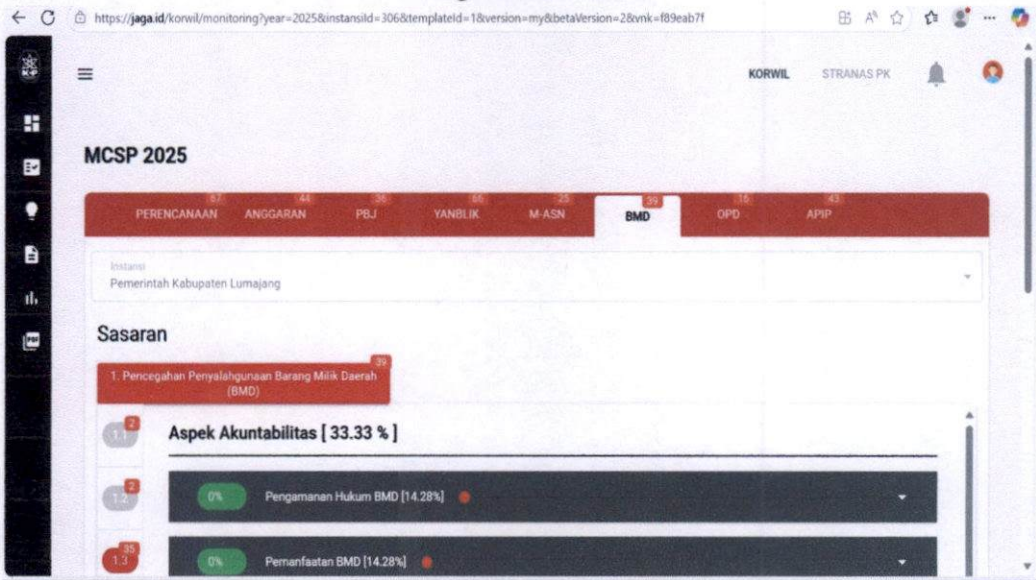
Gambar 9
Area Pelayanan Publik



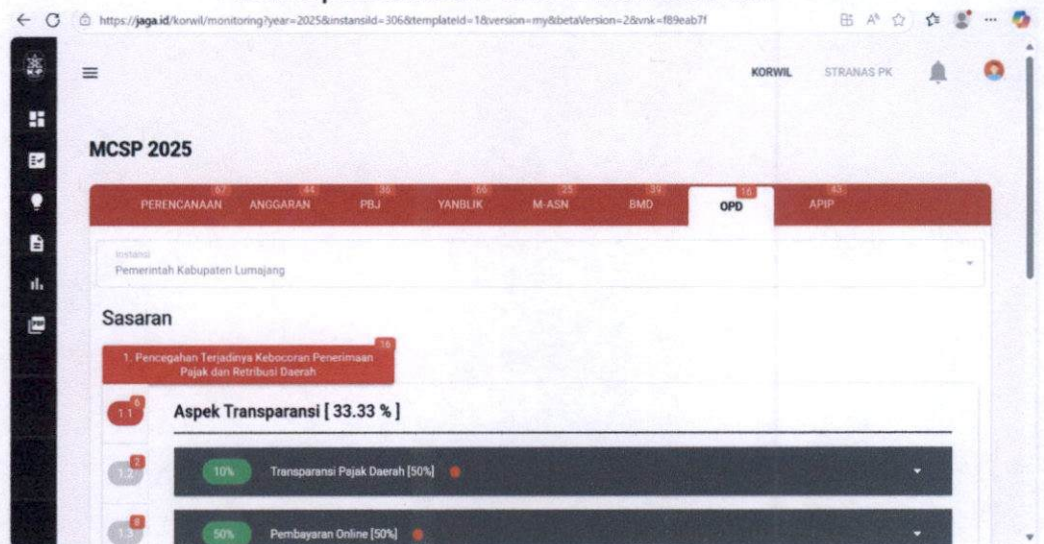
Gambar 10
Area Manajemen ASN



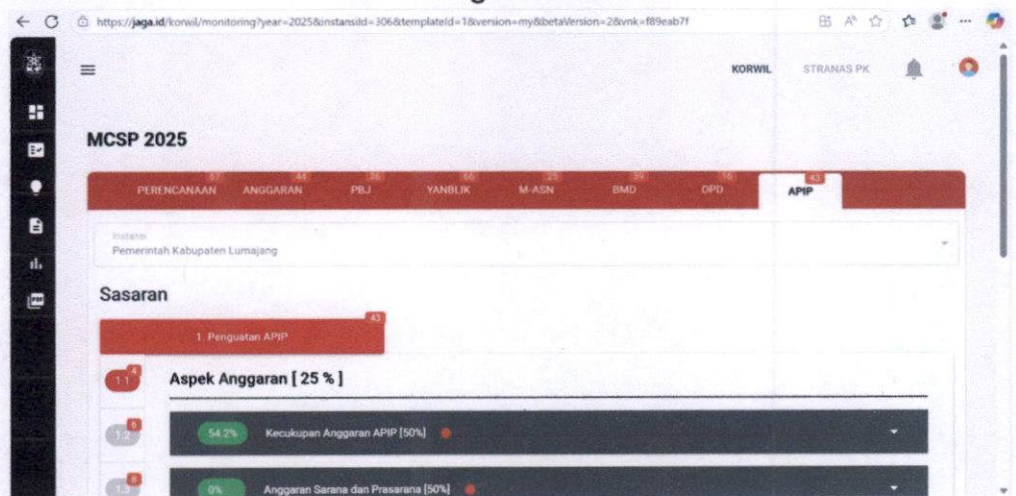
Gambar 11
Area Pengelolaan BMD



Gambar 12
Area Optimalisasi Penerimaan Daerah



Gambar 13
Area Penguatan APIP



2. Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, belum dapat dihitung realisasi dan capaian kinerjanya karena sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan penilaian oleh Kementerian PAN-RB belum dimulai.

Sebagai antisipasi telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengusulan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Kabupaten Lumajang secara daring pada tanggal 3 Juni 2025, yang diikuti oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit Kerja diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kesehatan P2KB beserta seluruh Puskesmas se-Kabupaten Lumajang, RSUD "dr. HARYOTO" dan RSUD Pasirian.

- c. Melaksanakan Desk Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dan Data Dukung Pengusulan Zona Integritas Tahun 2025 pada tanggal 11-17 Juni 2025, yang diikuti oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit Kerja diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kesehatan P2KB beserta seluruh Puskesmas se-Kabupaten Lumajang, RSUD “dr. HARYOTO” dan RSUD Pasirian.
3. Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 49, dapat direalisasikan sebesar 49 dan capaiannya 100%. Target tersebut dapat dicapai 100% dengan melakukan upaya-upaya berikut :
- Optimalisasi sistem informasi pengawasan (SIMWAS) *fraud risk control* (FRC) dengan URL simwas.itdalumajang.id pada indikator Akuntabilitas Manajemen ASN.
 - Koordinasi intens dengan PIC FRC Perangkat Daerah dalam memenuhi kriteria pada indikator Akuntabilitas Manajemen ASN.
 - Melakukan pemantauan progres pelaporan LHKPN melalui portal E-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>).

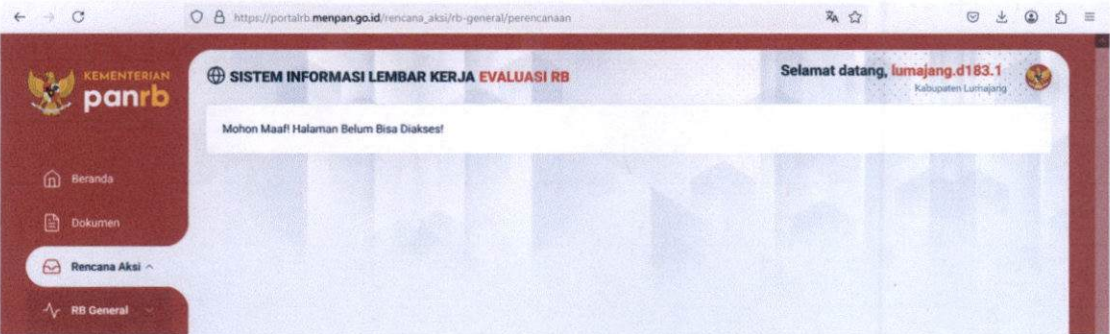
Gambar 14
Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Pemkab. Lumajang



❖ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya rencana aksi RB daerah**

Sasaran staretegis ini diukur dengan indikator Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB yang ditargetkan dalam Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0, sehingga belum dapat dihitung realisasi dan capaian kinerjanya karena sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB belum dimulai. Disamping itu, sistem informasi lembar kerja evaluasi RB portalrb.menpan.go.id belum dibuka aksesnya untuk Pemerintah Daerah.

Gambar 15
Portal Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB



Sebagai upaya antisipasi untuk mencapai target indikator tersebut dilakukan upaya berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi untuk optimalisasi pemenuhan capaian RB Tematik bertempat di ruang multimedia Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang yang diikuti oleh koordinator pengampu RB Tematik.
- b. Mengisi capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 menggunakan form Excel.

Gambar 16
Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025

Capaian TW I dan II

File Edit Tampilan Sisipan Format Data Alat Bantuan

100%

12

B I A

13

F

A

AZAE2

CAPAIAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL TRIBULAN I DAN II

CAPAIAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL TRIBULAN I DAN II																			
Rencana Aksi	KATEGORI	SISTEM	Target / Pencapaian												Tahun 2023		Pencapaian		
			Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025				Rata-rata				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			

+

≡

2 Sheet1

Sheet2

Sheet3

❖ **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas APIP**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Kapabilitas APIP yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 3,1, belum

dapat dihitung realisasi dan capaian kinerjanya karena sampai dengan 30 Juni 2025 pelaksanaan evaluasi oleh BPKP belum dimulai.

Sebagai antisipasi dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Optimalisasi layanan Inspektorat Service Center (ISC) dengan memberikan layanan konsultasi kepada perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- b. Melaksanakan Telaah Sejawat Intern dan Ekstern. Dalam pelaksanaan Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditelaah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan mulai tanggal 15-23 Mei 2025. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terhadap standar adalah 89,79%, dengan kategori penilaian “Baik”.

Sedangkan, pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menelaah Inspektorat Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan mulai tanggal 22-23 Mei 2025 di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

- c. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan dan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM APIP dengan mengikuti diklat pengawasan serta diklat lainnya sesuai GAP Kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tujuan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai SPI	0	19,56%	19,56%

Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	0	14,31%	14,31%
	Nilai MRI	0		
Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	0	6,01%	6,01%
	Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	0		
	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	100%		
Sasaran 3 : Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	0	5,13%	5,13%
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	0	22,38%	22,38%

Pada Tabel 15 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Inspektorat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 19.901.994.958,57 dan realisasinya sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II) sebesar Rp. 3.893.358.237,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 19,56%.

Sedangkan, pada Tabel 14 ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi Inspektorat Daerah dalam mendukung kinerja tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN belum dapat dihitung, karena belum terdapat capaian kinerja indikator tujuan yang disebabkan karena masih belum dilaksanakannya survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK RI.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan Inspektorat Daerah sebanyak 179 orang, kondisi sampai dengan 30 Juni 2025 jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 47, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 26,25%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Triwulan II ini yang sebagian besar belum terdapat realisasi, maka dengan jumlah SDM yang minimal, diupayakan akan dapat memenuhi target kinerja sehingga cukup efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah yang ada saat ini dengan kondisi 100% baik. Kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien namun tetap membutuhkan pemeliharaan pada beberapa golongan sarana dan prasarana, sehingga dapat digunakan dengan baik dan lancar.

3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

Indikator : Nilai SPI, dengan target 78, realisasi N.A. dan capaiannya N.A.%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan internal

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SPIP dan Nilai MRI ditunjang oleh 2 program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kinerja sasaran program Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan yang diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Target untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah 75% dan realisasi 75% sehingga capaiannya 100%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan Internal yang diukur dengan indikator Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan pada Triwulan II tahun 2025 ini dengan target 27 laporan dan realisasi 23 laporan sehingga capaiannya 85,18%.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 17 laporan dan realisasi 2 laporan sehingga capaiannya 11,76%.

- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kinerja sasaran program Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian internal yang diukur dengan indikator Persentase capaian pemenuhan FRC/SPIP perangkat daerah. Target untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah 0% dan realisasi 0 % sehingga capaiannya 0%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kegiatan Meningkatnya pengendalian risiko di perangkat daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penilaian dan mitigasi risiko sesuai dengan kebijakan pengawasan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 49 Perangkat Daerah dan realisasi 49 Perangkat Daerah sehingga capaiannya 100%.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai MCP, Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal dan Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu ditunjang oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kinerja sasaran program :

- 1) Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti. Target untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah 0% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan Masyarakat yang diukur dengan indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan (consulting) yang diukur dengan indikator:

- 1) Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 49 perangkat daerah dan realisasi 49 sehingga capaiannya 100%.
- 2) Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan diverifikasi pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 1 pengaduan dan realisasi 4 sehingga capaiannya 400%. Realisasi melebihi jumlah target yang disebabkan karena jumlah pengaduan masyarakat yang masuk tidak

dapat diprediksi namun harus diterima dan diverifikasi untuk ditindaklanjuti.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB ditunjang oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan sasaran kinerja program :

- 1) Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi RB Ex-ante yang diukur dengan indikator Persentase tindak lanjut hasil evaluasi RB ex-ante pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%.
- 2) Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi RB on going yang diukur dengan indikator Persentase tindak lanjut hasil evaluasi RB on going pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan sasaran kegiatan :

- 1) Terlaksananya evaluasi RB Ex-ante yang diukur dengan indikator Jumlah OPD yang dievaluasi renaksi RB ex-ante pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0 OPD dan realisasi 0 OPD sehingga capaiannya 0%.
- 2) Terlaksananya evaluasi RB on going yang diukur dengan indikator Jumlah OPD yang dievaluasi renaksi RB on going pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0 OPD dan realisasi 0 OPD sehingga capaiannya 0%.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas APIP

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP ditunjang oleh 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan yang diukur dengan indikator Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 2 laporan dan realisasi 2 laporan sehingga capaiannya 100%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sasaran kinerja Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun pada Triwulan II

- tahun 2025 dengan target 2 rekomendasi dan realisasi 2 rekomendasi sehingga capaiannya 100%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kinerja program :
- 1) Meningkatnya APIP yang tersertifikasi yang diukur dengan indikator Jumlah Auditor/PPUPD yang lulus sertifikasi pengawasan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0 orang dan realisasi 0 orang sehingga capaiannya 0%. Pelaksanaan sertifikasi Auditor/PPUPD sesuai dengan jadwal instansi penyelenggara (BPKP).
 - 2) Meningkatnya audit, QA, dan pengawasan lainnya yang dilakukan sesuai standar yang diukur dengan indikator Persentase Capaian PKPT pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran kinerja Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diukur dengan indikator Persentase kesesuaian PKPT dengan Rencana Kerja Tahunan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sasaran kinerja Meningkatnya pembinaan terhadap APIP yang diukur dengan indikator Jumlah Auditor/PPUPD yang mengikuti diklat pengawasan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target 0 orang dan realisasi 7 orang sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 25 orang maka capaiannya 28%.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp.19.901.994.958,57 dengan realisasi anggaran per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp. 3.893.358.237,00 atau sebesar 19,56%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.067.412.000,00	295.824.300,00	14,31
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.957.043.000,00	267.960.798,00	9,06
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.877.539.958,57	3.329.573.139,00	22,38
	Jumlah	19.901.994.958,57	3.893.358.237,00	19,56

3.3. Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja diatas, Inspektorat Daerah juga mempunyai kinerja lain yaitu Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait Kinerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui rencana aksi berikut:

- Meningkatkan pengetahuan evaluatan dan evaluator terkait dengan evaluasi AKIP baik melalui PPM/ Bimtek/ Diklat/ Sosialisasi, dst serta melakukan evaluasi atas hal tersebut
- Mengintegrasikan sistem Evaluasi SAKIP dengan sistem FRC untuk evaluasi secara periodik sebagai salah satu komponen dalam menentukan besaran TPP Perangkat Daerah
- Melakukan Konsultasi/ pendampingan termasuk menekankan dilakukannya self assessment evaluasi SAKIP di tingkat perangkat daerah sebelum diserahkan ke evaluator SAKIP Kabupaten
- Evaluator internal memberikan catatan dan rekomendasi pada LHE AKIP OPD secara terinci dan memadai
- Mewajibkan setiap OPD menyusun action plan terhadap hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan pohon kinerja dan sasaran dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.
2. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang, namun demikian masih terdapat kendala dan hambatan diantaranya :
 - Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup instansi pusat hingga pemerintah daerah
 - Sebagian besar capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Triwulan II belum dapat disajikan karena bergantung pada pelaksanaan penilaian/evaluasi oleh instansi vertikal diantaranya KPK RI, BPK, BPKP dan Kementerian PAN RB
 - Tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil reviu/evaluasi/pemeriksaan dari BPK/APIP belum optimal.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah terkait kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Melaksanakan koordinasi intens dengan perangkat daerah dan instansi lainnya (BPK, KPK RI, BPKP, Kementerian PAN RB, dst) serta Aparat Penegak Hukum (APH);
3. Optimalisasi layanan Inspektorat Service Center (ISC);
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil reviu/evaluasi/pemeriksaan dari BPK/APIP;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
6. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan mandiri (PPM) dan mengikuti diklat, bimtek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal.

Lumajang, 15 Juli 2025
INSPEKTOR DAERAH

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum
NIP. 19660710 199203 1 007

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H, M. Hum**

Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, SH., M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M. Hum
KIP. 966710 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	3,4
		Nilai MRI	3
2	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	94,5
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	3
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	40
3	Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	80%
4	Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.067.432.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 2.957.043.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.877.629.958,57	DAU
	Total	Rp. 19.902.104.958,57	

Lumajang, 10 Januari 2025


Pj. BUPATI LUMAJANG
INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si


INSPEKTUR DAERAH
AKHMAH TAQIK HIDAYAT, SH, M. Hum
NIP. 19660710 199203 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H, M. Hum**

Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 03 Maret 2025



Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



Pihak Pertama,

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum

NIP. 19660710 199203 1 007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai SPIP	3,4
		Nilai MRI	3,1
2	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	95,5
		Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	5
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LHKAN dan LHKPN tepat waktu	49
3	Meningkatnya rencana aksi RB daerah	Capaian nilai komponen kualitas renaksi RB	58%
4	Meningkatnya kualitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,1

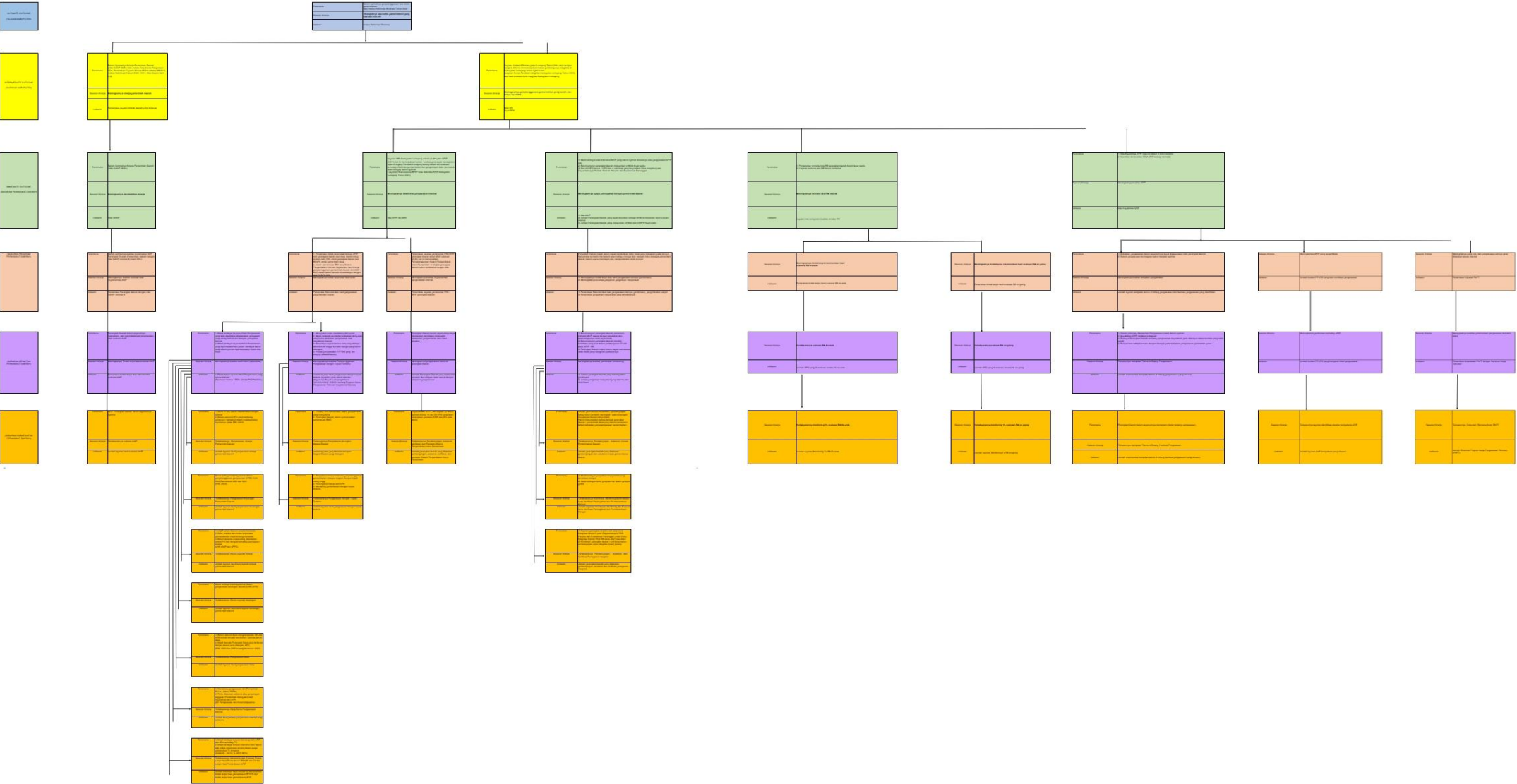
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.067.432.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 2.957.043.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.877.629.958,57	DAU
Total		Rp. 19.902.104.958,57	

Lumajang, 3 Maret 2025


Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.


AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum
NIP. 19660710 199203 1 007

❖ DOKUMEN POHON KINERJA



❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								9,804,468,840.96		10,784,915,725.00		1,863,407,298.00		32,452,791,863.96		
6 01 02	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan x 100	89.64%	90%	1,686,467,500	90%	1,968,467,500	90%	1,976,641,423	90%	5,631,576,423.00	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan umum yang diterbitkan	142	188	1,141,467,500	333	1,423,467,500	188	1,349,891,423	709	3,914,826,423.00		
6 01 02 2.01 01	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang disusun	70	60	257,267,500	110	307,267,500	60	305,857,625	230	870,392,625.00		
6 01 02 2.01 02	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah yang disusun	20	48	339,200,000	48	349,200,000	48	400,080,000	144	1,088,480,000.00		
6 01 02 2.01 03	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang disusun	2	1	48,000,000	1	48,000,000	1	63,503,798	3	159,503,798.00		
6 01 02 2.01 04	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang disusun	1	1	80,000,000	1	80,000,000	1	100,900,000	3	339,200,000		
6 01 02 2.01 05	Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun	20	63	252,000,000	158	474,000,000	63	289,800,000	284	1,015,800,000.00		
6 01 02 2.01 06	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan kerjasama yang disusun	27	11	75,000,000	11	75,000,000	11	86,250,000	33	236,250,000.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 02 2.01 07	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang disusun 2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang disusun	2	4	90,000,000	4	90,000,000	4	103,500,000	12	283,500,000.00		
							62	545,000,000	62	545,000,000	62	626,750,000.00	186	1,716,750,000.00		
							-	70,000,000	8	70,000,000	8	80,500,000	24	220,500,000.00		
6 01 02 2.02 01	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	Jumlah laporan hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	-	8	70,000,000	8	70,000,000	8	80,500,000	24	220,500,000.00		
6 01 02 2.02 02	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun	31	54	475,000,000	54	475,000,000	54	546,250,000	162	1,496,250,000.00		
6 01 02	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang ditindak lanjuti	%	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang Ditindak Lanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan lainnya x 100	77.73%	90%	1,404,903,924	90%	1,432,041,066	90%	1,763,918,000.00	90%	4,600,862,990.00		
			Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang sesuai standar	%	Jumlah LHP yang sesuai standar/ Jumlah LHP yang diterbitkan x 100	100%	100%		100%		100%		100%			
			Nilai Kapabilitas APIP	Angka	Nilai Kapabilitas APIP (hasil evaluasi BPKP)	3	3		3		3		3			

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 03 2 01	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan / keputusan / kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Laporan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	10	10	409,000,000	10	415,000,000	10	553,600,000.00	30	1,377,600,000.00		
6 01 03 2.01 01	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	10	10	264,000,000	10	270,000,000	10	303,600,000	30	837,600,000.00		
6 01 03 2.01 02	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	10	10	145,000,000	10	145,000,000	10	250,000,000	30	540,000,000.00		
6 01 03 2 02	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Laporan	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	34	26	995,903,924	26	1,017,041,066	26	1,210,318,000.00	78	3,223,262,990.00		
6 01 03 2.02 01	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	60	40	50,000,000	40	50,000,000	40	57,500,000	40	157,500,000.00		
6 01 03 2.02 02	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	43	49	200,000,000	49	200,000,000	49	230,000,000	49	630,000,000.00		
6 01 03 2.02 03	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	10	18	682,583,924	18	703,721,066	18	850,000,000	54	2,236,304,990.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pemberantasan korupsi													
6 01 03 2.02 04	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	45	49	63,320,000	49	63,320,000	49	72,818,000	49	199,458,000.00		
6 01 01	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan x 100	98%	100%	6,713,097,417	100%	7,384,407,159	100%	8,122,847,875	100%	22,220,352,450.96		
6 01 01 2.01	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	43,360,000	100%	49,660,000	100%	55,360,000.00	100%	148,380,000.00		
6 01 01 2.01 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3	10,000,000	4	13,300,000	3	10,000,000.00	10	33,300,000.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 01 2.01 02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0	1	3,120,000	1	3,120,000	1	3,120,000.00	3	9,360,000.00		
6 01 01 2.01 03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	2	6,240,000	2	6,240,000	2	6,240,000.00	6	18,720,000.00		
6 01 01 2.01 06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan evaluasi LKJ	0	5	12,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000.00	15	36,000,000.00		
6 01 01 2.01 07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	13	12,000,000	14	15,000,000	13	24,000,000.00	40	51,000,000.00		
6 01 01 2.02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	4,279,814,470	100%	4,279,814,470	100%	4,465,120,000.00	100%	13,024,748,940.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 01 2.02 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33/12	33/12	4,212,594,470	33/12	4,212,594,470	33/12	4,400,000,000.00	33/36	12,825,188,940.00		
6 01 01 2.02 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12	12	52,100,000	12	52,100,000	12	50,000,000.00	36	154,200,000.00		
6 01 01 2.02 05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	3,120,000	1	3,120,000	1	3,120,000.00	3	9,360,000.00		
6 01 01 2.02 07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000.00	36	36,000,000.00		
6 01 01 2.05	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	89%	100%	900,000,000	100%	938,600,000	100%	900,000,000.00	100%	2,738,600,000.00		
6 01 01 2.05 02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	0	1	38,600,000	1	38,600,000				

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 01 2.05 09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	25	25	900,000,000	25	900,000,000	25	900,000,000.00	75	2,700,000,000.00		
6 01 01 2.06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	439,632,500	100%	439,632,500	100%	439,632,500.00	100%	1,318,897,500.00		
6 01 01 2.06 01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Jumlah paket komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000.00	3	45,000,000.00		
6 01 01 2.06 04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	3	110,000,000	3	110,000,000	3	110,000,000.00	9	330,000,000.00		
6 01 01 2.06 05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000.00	3	39,000,000.00		
6 01 01 2.06 09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	12	301,632,500	12	301,632,500	12	301,632,500	36	904,897,500.00		
6 01 01 2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	121,418,447	100%	272,828,189	100%	1,308,863,375.00	100%	1,703,110,010.96		
6 01 01 2.07 06	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	5	12	121,418,447	58	272,828,189	87	1,308,863,375	157	1,703,110,010.96		
6 01 01 2.08	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	Persentase fasilitasi jasa	%	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang	100%	100%	423,872,000	100%	423,872,000	100%	423,872,000.00	100%	1,271,616,000.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan operasional Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100											
6 01 01 2.08 01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000.00	36	3,000,000.00		
6 01 01 2.08 02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000.00	36	750,000,000.00		
6 01 01 2.08 04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	172,872,000	12	172,872,000	12	172,872,000	36	518,616,000.00		
6 01 01 2.09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	98%	100%	505,000,000	100%	980,000,000	100%	530,000,000.00	100%	2,015,000,000.00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 01 01 2.09 02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	27	400,000,000	27	400,000,000	27	400,000,000.00	81	1,200,000,000.00		
6 01 01 2.09 06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	36	36	80,000,000	36	80,000,000	36	80,000,000.00	108	240,000,000.00		
6 01 01 2.09 09	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	1	25,000,000	1	500,000,000	1	50,000,000.00	3	575,000,000.00		

DOKUMEN RENCANA AKSI (ACTION PLAN) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

RENCANA AKSI TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG																																	
No	SARAFAN	Indikator Sasaran	Sasaran				PROGRAM	Indikator Program/ Outcome	Target Program (Outcome)				KEGIATAN	Output Kegiatan	Target Kegiatan				SUB KEGIATAN	Output Sub Kegiatan	Target Output				Anggaran Disahkan	Target Anggaran Kegiatan Tahunan				Jenis	PPPK		
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV		I	II	III	IV				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Nilai RPP	-	-	-	3,4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Penerapan Sistem Kerja hasil pengembangan yang Ditindak Lanjut Pemerintah Perangkat daerah dengan nilai SARIP minimal B	0%	75%	0%	100%	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	18	27	133	14	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	19	0	9	9	1	299,470,000	419,000	103,331,000	129,842,000	10,878,000	Peningkatan Kinerja, Efisiensi RPJMD dan Rencana Kerja RPJMD, dan Rerita Persekolah unggulan	Urban II	
		Nilai MRI	-	-	-	3,1			-	-	-	91,84%			-	-	-	20%			49	0	0	49	0								
																					63	13	14	27	9								
																					1	1	0	0	0								
																					66,673,000												
																					62,093,000												
																					305,782,000	-											
																					58,017,500	58,017,500	58,017,500	58,017,500									
																					46,331,500	26,171,500	26,171,500	26,171,500									
																					13,770,000	13,770,000	13,770,000	13,770,000									
2	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah	Nilai MCP	-	-	-	95,5	Program Pemertan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan Pemerintah capaian pemertan FRC / SPP perangkat daerah	1	2	3	4	Pemertan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	2	2	2	4	Pemertan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kegiatan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang diterbitkan	8	0	2	2	4	457,722,000	84,945,500	96,795,500	86,719,500	195,266,500	Peningkatan Audit, Fasilitas Pengawasan BUMD, BUMDes, BUCD, dan Rerita Persekolah unggulan	Urban III	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diberikan sebagai WBK berdasarkan hasil evaluasi internal	-	-	-	5			-	-	-	65%			-	-	-	-			10	1	4	4	1								
		Jumlah Perangkat Daerah yang tercapai LHKM dan LHKPS tipe 1 atau lebih	-	-	-	49			-	-	-	90%			-	-	-	-			40	9	10	10	11								
		Capaian nilai komponen kualitas resiko RB	-	-	-	58			100%	100%	100%	100%			49	49	49	49			49	49	49	49	49								
		Meningkatnya rencana aksi RB daerah	-	-	-	58			100%	100%	100%	100%			49	49	49	49			49	49	49	49	49								
		Meningkatnya kualitas APP	-	-	-	3,1			-	-	-	80%			1	1	1	2			30	6	8	7	9								
		Nilai Kapabilitas APP	-	-	-	3,1			-	-	-	90%			-	-	-	13			49	49	49	49	49								
																					4	1	2	0	1								
																					1	0	0	0	1								
																					3	1	0	1	0								

 dari 3

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD										
KAB. LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025																				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																				
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									Rp15.281.575.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.902.104.958,57	Rp15.281.485.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.901.994.958,57	(Rp110.000,00)	(0,00)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Rp15.281.575.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.902.104.958,57	Rp15.281.485.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.901.994.958,57	(Rp110.000,00)	(0,00)
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				Rp15.281.575.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.902.104.958,57	Rp15.281.485.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.901.994.958,57	(Rp110.000,00)	(0,00)
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp15.281.575.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.902.104.958,57	Rp15.281.485.447,88	Rp4.620.529.510,89	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.901.994.958,57	(Rp110.000,00)	(0,00)
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp57.822.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.822.000,00	Rp57.822.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.822.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp12.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.198.000,00	Rp12.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.198.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp3.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.108.000,00	Rp3.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.108.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp6.216.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.216.000,00	Rp6.216.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.216.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp16.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.140.000,00	Rp16.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.140.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp20.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.160.000,00	Rp20.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.160.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp4.968.515.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.968.515.342,00	Rp4.968.515.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.968.515.342,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp4.900.817.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.817.342,00	Rp4.900.817.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.817.342,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp52.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.332.000,00	Rp52.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.332.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp3.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.108.000,00	Rp3.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.108.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp12.258.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.258.000,00	Rp12.258.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.258.000,00	Rp0,00	0,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp1.990.521.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.990.521.200,00	Rp1.990.431.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.990.431.200,00	(Rp90.000,00)	(0,00)
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		Rp137.995.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.995.200,00	Rp137.995.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.995.200,00	Rp0,00	0,00

*) Sesuai periodisasi SPD

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**

Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto



Telaah Sejawat Ekstern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ke Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo



Rapat Koordinasi MCSP 2025



Rapat Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI)



Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)



Rapat Koordinasi Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI)



Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	TGL/NO. LHP
1	Laporan Hasil reuiu DAK Fisik Penugasan Air Minum Sub Bidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman kumuh Terpadu 3 Tahun Anggaran 2024	21 April 2025 700.1.2.8/16/427.3/2025
2	Laporan Hasil Reviu Dak Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Tahap 3 TA. 2024	21 April 2025 700.1.2.8/17/427.3/2025
3	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub bidang Sanitasi Tematik Pengentasan Pemukiman kumuh tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/18/427.3/2025
4	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/19/427.3/2025
5	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman Tematik Pengentasan Permukiman kumuh terpadu Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/20/427.3/2025
6	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan bidang irigasi sub bidang Jalan-Tematik Penguatan kawasan sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/21/427.3/2025
7	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi bidang irigasi-Tematik penguatan kawasan sentara Produksi pangan (Pertanian,Perikanan dan Hewani) Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/22/427.3/2025
8	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang penguatan penurunan angka kematian ibu bayi dan intensi stunting tahap sekaligus rekomendasi TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/23/427.3/2025
9	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang KB Tahap sekaligus TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/24/427.3/2025
10	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub bidang Penguatan sistem Kesehatan Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/25/427.3/2025
11	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang penguatan penurunan angka kematian ibu bayi dan intervensi stunting Tahap 3 TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/26/427.3/2025
12	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Penguatan bidang Kesehatan dan KB Sub bidang penguatan sistem kesehatan tahap Sekaligus Rekomendasi TA 2024	21 April 2025 700.1.2.8/27/427.3/2025
13	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sub bidang Pertanian-Tematik penguatan kawasan sertra produksi pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) tahap sekaligus rekomendasi TA 2024	23 April 2025 700.1.2.8/28/427.3/2025
14	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) Tahap 3 TA 2024	23 April 2025 700.1.2.8/29/427.3/2025
15	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan sub bidang sd Tahap 3 TA 2024	25 April 2025 700.1.2.8/30/427.3/2025
16	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMP Tahap 3 TA 2024	28 April 2025 700.1.2.8/31/427.3/2025
17	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap Sekaligus TA 2024	28 April 2025 700.1.2.8/32/427.3/2025
18	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Dana dan Capaian Keluaran (output) kegiatan Dana Alokasi khusus Fisik TA 2024	29 April 2025 700.1.2.8/33/427.3/2025
19	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sib Bidang SD Tahap Sekaligus Rekomendasi TA 2024	29 April 2025 700.1.2.8/34/427.3/2025
20	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap Sekaligus Rekomendasi TA 2024	29 April 2025 700.1.2.8/35/427.3/2025
21	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Usulan Alkes SOPHI-InPULS Tahun 2025	15 Mei 2025 700.1.2.8/36/427.3/2025

22	Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Direktur Tirta Mahameru	21 Mei 2025 700.1.2.8/37/427.3/2025
23	Laporan Hasil Reviu Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025	4 Juni 2025 700.1.2.8/38/427.3/2025
24	Laporan Hasil Reviu HPS Modal Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku Perpustakaan dan Buku Penunjang Sekolah) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Tahun 2024	4 Juni 2025 700.1.2.8/39/427.3/2025
25	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Hibah pada Pembangunan Musholah Miftahul Huda di Kabupaten Lumajang Tahun 2023	6 Juni 2025 700.1.2.8/40/427.3/2025